



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional telah memperlihatkan hasil yang nyata bagi bangsa Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan umumnya berasal dari devisa negara, hasil ekspor migas dan non migas, disamping adanya bantuan luar negeri serta tabungan pemerintah yang bersumber dari berbagai jenis pajak dalam masyarakat.

Pengembangan ekspor non migas merupakan upaya penting yang dalam jangka pendek diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, dan dalam jangka panjang dapat menjadi pilar yang kokoh untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Dalam kaitan tersebut, di era desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, tidak hanya pemerintah pusat saja yang harus peduli terhadap pengembangan ekspor, akan tetapi pemerintah daerah juga harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, karena pada hakekatnya struktur perekonomian daerah juga harus kokoh dan kuat.

Secara hirarkis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih tersisa hubungan koordinatif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pengembangan ekspor. Oleh karena itu hubungan tersebut harus tetap berlangsung secara efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saing, akses pasar dan memelihara pangsa pasar (Syafri, 2003).

Menurut Chottob dan Suharjo (2000) pemberian kewenangan otonomi daerah secara luas kepada daerah kabupaten dan daerah kota melalui asas desentralisasi menurut UU No. 22 Tahun 1999, tidak hanya sebatas pelaksanaan desentralisasi kepada birokrasi pemerintahan daerah, melainkan secara operasional harus menyentuh pelaksanaan desentralisasi kepada masyarakat, yang diimplementasikan





melalui peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan. Menurut Syafie (2002) bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi-bagi pemerintahannya menjadi sistem yang lebih kecil (pemerintahan daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang, sehingga kegiatan operasional pemerintahan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Mubyarto (1986) agar pengusaha bersedia terjun ke bidang ekspor non migas, maka harus ada jaminan bahwa mereka tidak akan rugi. Di sinilah muncul peranan pemerintah. Pemasaran barang-barang ekspor hanya dimungkinkan bila pemerintah membangun jalan-jalan yang lancar, hubungan telekomunikasi yang baik, penyediaan fasilitas perkreditan dan insentif yang khusus dalam mengimpor mesin-mesin untuk industri dan pengolahan produk.

Dalam dekade terakhir pemerintah telah beberapa kali melakukan deregulasi dan desentralisasi di bidang perdagangan luar negeri, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menganeka ragamkan produk ekspor, memperbanyak negara tujuan ekspor dan meningkatkan jumlah pelaku ekspor. Perjanjian mengenai pendirian *World Trade Organization (WTO)* yang ditandatangani oleh sejumlah besar negara di Marakesh pada tahun 1994, menjadi tonggak sejarah yang memberikan harapan, khususnya bagi negara-negara anggotanya termasuk Indonesia, akan semakin liberalnya perdagangan internasional.

Hal ini berarti akses pasar akan semakin longgar dan tindakan proteksionisme yang lazim dilakukan oleh negara maju akan berkurang. Aturan main yang tertuang di dalam sejumlah peraturan mengenai beberapa subjek misalnya praktek *dumping*, perlindungan, subsidi dan lain sebagainya yang juga disepakati di sidang Marakesh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB, tahun 2005





tersebut akan menjadi acuan yang harus dilaksanakan secara ketat oleh semua negara anggotanya.

Peluang lain dengan terbentuknya WTO adalah semakin banyaknya ragam produk ekspor Indonesia yang dapat merefleksikan keberhasilan dan upaya pemerintah untuk mendiversifikasikan produk ekspor. Kendati perekonomian dunia diwarnai dengan perkembangan yang tidak menentu, namun masih memberikan peluang ekspor bagi Indonesia yaitu dengan melakukan berbagai langkah penyesuaian dan peningkatan daya saing melalui efisiensi di sejumlah sektor yang terkait dengan kegiatan ekspor.

Disamping keikutsertaan dalam WTO, maka untuk wilayah Asia Tenggara adalah keikutsertaan Indonesia dalam AFTA. Jalan keluar untuk menghadapi persaingan bebas dalam era liberalisasi perdagangan dalam pelaksanaan AFTA pada tahun 2010 adalah dengan cara memompakan semangat nasionalisme. Hasil yang diharapkan, meskipun produk dalam negeri mempunyai kualitas rendah dan harga mahal, rakyat Indonesia akan tetap mencintai produk dalam negeri. Namun, di samping praktek nasionalisme seperti di atas perlu dikaji lagi kebenarannya, cara tersebut pada dasarnya menipu rakyat (Azizy, 2003).

Untuk hal di atas, harus dipersiapkan produk yang dapat bersaing dengan produk dari negara-negara anggota ASEAN. Dalam rangka menghadapi persaingan bebas tersebut, produsen dalam negeri harus mampu menghasilkan produk yang kualitasnya lebih tinggi, dengan harga yang lebih murah.

Salah satu sumber pendapatan yang diharapkan dapat menambah devisa penerimaan negara dari ekspor non migas adalah pengembangan sektor industri. Sejalan dengan hal tersebut maka tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 56 Tahun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



2002 adalah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha perindustrian dan perdagangan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Fungsi yang dijalankannya antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan
- b. Pembinaan terhadap pertumbuhan dan pengembangan usaha perindustrian dan perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- c. Fasilitas, sarana, prasarana, permodalan, pemasaran perindustrian dan perdagangan
- d. Penelitian, pengembangan industri dan perdagangan serta rekayasa industri
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan pameran promosi hasil industri dan perdagangan dalam dan luar negeri

Berdasarkan Rencana Strategi Daerah DKI Jakarta Tahun 2002 – 2007, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan sektor industri dan perdagangan yang terdapat di DKI Jakarta melaksanakan empat program sebagai berikut :

1. Penataan, penguatan basis industri dan perdagangan
2. Penataan, pengembangan produk industri dan perdagangan
3. Penataan jaringan distribusi produk industri dan perdagangan
4. Pengembangan ekspor

Rachbini (1999) mengemukakan bahwa secara teoritis, pengembangan sektor industri seharusnya mengikuti pola normal. Dari industri berbasis sumber daya alam dan buruh kurang terampil, menjadi industri berbasis sumber daya manusia dan teknologi, sehingga diperlukan inovasi dalam pengembangan sektor industri.

Inovasi pada sektor industri bukan hanya masalah produk dan teknologi, tetapi juga merupakan masalah sumber daya manusia. Sebuah perusahaan yang rendah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB, tahun 2005



Program Pascasarjana
Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MB-IPB



tingkat inovasinya memerlukan manajemen yang inkremental, sedang yang tinggi tingkat inovasinya memerlukan manajemen yang radikal. Perubahan yang radikal ini menandai pergeseran dari suatu ekonomi yang menyediakan beberapa kebutuhan pokok “jasmaniah”, ke arah ekonomi yang ingin pula melayani kebutuhan “psikis” yang tidak terbatas (Toffler, 1985).

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor industri maka pengembangan tidak hanya ditentukan oleh menarik tidaknya peluang investasi pada suatu daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur-unsur pemasaran yang satu sama lainnya saling terkait. Salah satu unsur tersebut adalah promosi sektor industri yang tujuannya adalah agar investor mau menanamkan investasinya sehingga pendapatan daerah dapat meningkat.

Dalam memasuki abad ke 21 penyelenggaraan pembangunan sektor industri dituntut untuk mampu mengadaptasikan diri terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi pada skala nasional, regional dan internasional yaitu di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan keamanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut sesuai dengan visi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta yakni mewujudkan industri dan perdagangan DKI Jakarta yang tangguh dan kuat dalam persaingan global.

Untuk mencapai keberhasilan, visi tersebut didukung oleh misi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut (Keputusan Gubernur Nomor 56 Tahun 2002) :

1. Mewujudkan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota jasa melalui pembangunan sektor industri dan perdagangan
2. Sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang berkelanjutan



Program Pascasarjana
Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB, tahun 2005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



3. Menciptakan struktur industri dan perdagangan yang kuat dan berbasis kandungan lokal

Strategi pembangunan perindustrian dan perdagangan Provinsi DKI Jakarta pada hakekatnya bersifat multidimensi dan lintas sektoral/regional guna menjamin terselenggaranya pembangunan sesuai dengan tugas pokok, yang telah ditetapkan sebagai berikut (Keputusan Gubernur Nomor 56 Tahun 2002) :

- a. Peningkatan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah
- b. Peningkatan peran industri dagang kecil menengah (IDKM) dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat
- c. Pemanfaatan keunggulan komparatif dan penciptaan keunggulan kompetitif dalam rangka persaingan global
- d. Peningkatan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian
- e. Penataan kelembagaan dalam rangka era perdagangan bebas
- f. Pengembangan sumber daya manusia sektor industri dan perdagangan secara intensif melalui akselerasi transformasi teknologi
- g. Pengembangan dan penguatan sumber daya informasi dalam mendorong pembangunan sektor industri dan perdagangan

Dalam penerapannya, pengaturan sektor industri dapat ditinjau dari segi makro dan mikro. Penerapan secara makro berupa kebijakan pengaturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan untuk memangkas berbagai bentuk perijinan yang tidak perlu, pengaturan ketenagakerjaan dalam bentuk upah dan peraturan lainnya yang melindungi tenaga kerja dan investor.

Secara mikro berupa fungsi-fungsi manajemen termasuk upaya-upaya promosi dan sebagainya. Kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB, tahun 2005



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dan Perdagangan DKI Jakarta di dalam negeri adalah melalui arena Pekan Raya Jakarta yang dilaksanakan setiap tahun, dan pembentukan *Emporium Batam Sands* di Pulau Batam, serta kegiatan pameran produk-produk hasil industri seperti *handicraft*, tekstil, *furniture* dan lain-lain. Untuk kegiatan promosi di luar negeri, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pamerannya melalui *Budapest International Trade Fair* (2003) di Hungaria, misi dagang di Wina –Austria, Pameran *Indonesia Solo Exhibition* di Sharjah – Uni Emirat Arab (2003), *Tong Tong Fair* di Negara Belanda (2002), *Cairo Expo* di Negara Mesir (2002), *The South Africa International Trade Exhibition* (2003), dan kegiatan promosi di beberapa negara lainnya.

Pada awal Tahun 2005 fasilitas kuota tekstil dan produk tekstil yang diberikan oleh negara-negara maju Eropa dan Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berakhir. Hal tersebut membawa pengaruh yang cukup besar terhadap ekspor produk tekstil Indonesia.

Persaingan di pasar tradisional akan semakin tajam, sehingga pemerintah perlu memperluas pasar ke negara-negara non tradisional lainnya seperti ke negara-negara Amerika Selatan, Vietnam, Meksiko, Pakistan, Bangladesh, Cina, Thailand, dan Timur Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pameran-pameran produk industri, baik di dalam maupun di luar negeri berhubungan dengan peningkatan kinerja sektor industri kecil produk tekstil.



Pradana Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MBB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- b. Apakah promosi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kinerja sektor industri kecil produk tekstil telah mencapai Sasarannya.
- c. Apakah kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelayanan kegiatan promosi telah sesuai dengan kepentingan sektor industri kecil produk tekstil.
- d. Apakah strategi promosi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan kepentingan pengusaha kecil produk tekstil.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan peningkatan kinerja sektor industri kecil. Secara rinci penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hubungan antara promosi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan peningkatan kinerja sektor industri kecil produk tekstil.
- b. Untuk mengetahui sasaran yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan promosi sektor industri kecil produk tekstil.
- c. Untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kepuasan sektor industri kecil produk tekstil terhadap pelayanan kegiatan promosi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Untuk merumuskan strategi promosi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kinerja sektor industri kecil produk tekstil.

1.4 Manfaat Penelitian

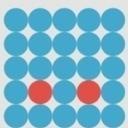




- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta dinas terkait lainnya untuk meningkatkan aktifitas yang diperlukan dalam peningkatan kinerja sektor industri kecil.
- b. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk kepentingan peningkatan kinerja sektor industri kecil dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Sebagai informasi dan bahan perbandingan bagi para peneliti yang berminat terhadap masalah sektor publik.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian tentang promosi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibatasi pada kegiatan promosi sektor industri kecil produk tekstil yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.